

## ANALISIS AKUNTABILITAS PUBLIK PADA KABUPATEN/KOTA PEMERINTAH INDONESIA

Mulya Meilisa<sup>1</sup> Fadli<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan bisnis/S1 Akuntansi, Universitas Bengkulu

E-mail: [meilisamulya@gmail.com](mailto:meilisamulya@gmail.com)

### *Abstract*

*This research aims to test and analyze public accountability analysis in Indonesian government districts/cities using a sampling technique, namely total sampling (census) in which the entire population is used as a sample. This research uses a quantitative approach. The data collection method in this research uses secondary data obtained from Regional Government Financial Reports (LKPD) sourced from BPK PPID and SAKIP Scores from LAKIP which are processed by the Ministry of Pan and RB-RI. The data analysis technique uses multiple linear regression analysis with the help of the SPSS program. The results of this research show that (1) weaknesses in the internal control system have a negative effect on the quality of public accountability, (2) audit findings have no effect on the quality of public accountability, (3) total expenditure has a positive effect on the quality of public accountability.*

**Keywords :** *accountability, internal control weaknesses, audit findings, total expenditure*

### 1. PENDAHULUAN

Akuntabilitas berasal dari bahasa asing yakni “*accountability*” yang berarti pertanggungjawaban. Akuntabilitas disini memiliki makna keadaan untuk dipertanggungjawabkan ataupun keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Secara umum, akuntabilitas berarti kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan mengenai kinerja dan tindakan dari badan hukum atau pimpinan suatu organisasi, kepada pihak yang berwenang menerima keterangan atau pertanggungjawaban tersebut.

Untuk menjamin akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dikembangkan suatu sistem akuntabilitas yang jelas, tepat dan teratur serta efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berbasis kinerja. SAKIP kemudian diterapkan melalui pembuatan target kinerja dan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan tata kelola yang baik. Pada bagian kesatu Pasal 2 Ayat 1 dijelaskan bahwa Pelaksanaan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. yang pada hakikatnya meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perencanaan strategis, peencanaan kinerja dan penetapan rencana rencana kerja meliputi penyusunan visi, tujuan misi, tujuan kebijakan dan program . Pada tahap ini instansi pemerintah menghasilkan rencana kerja jangka menengah lima tahun (RP JM/RP.IMD) yang kemudian diturunkan menjadi rencana kinerja satu tahun (RKP/RKPD), rencana anggaran (RKA), SOP dll.

2. Pengukuran kinerja meliputi pengukuran indikator kinerja, pengumpulan data kinerja, perbandingan dengan organisasi sejenis lainnya yang terbaik di bidangnya.
  3. Pelaporan kinerja, berupa pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan format standar laporan yang telah ditentukan (rinci dengan berbagai indikator bukti dan capaian).
  4. Pemanfaatan informasi kinerja untuk perbaikan kinerja selanjutnya secara berkelanjutan.
- Afifah et al., (2022)

SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi dan juga mendesign program dan kegiatan dalam pencapaian sebuah tujuan. Permasalahan penerapan SAKIP pemerintah di Indonesia merupakan suatu hal yang tentunya menarik untuk dikaji lebih lanjut. Faktanya, penerapan SAKIP diseluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia masih belum memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

Adapun salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan untuk menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas dan juga selaras. Petunjuk Teknis penerapan SAKIP diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang menjelaskan secara rinci mengenai perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara peninjauan laporan kinerja instansi Pemerintah.

Pencapaian kinerja dalam SAKIP dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan bagian dari SAKIP, dimana informasi yang termuat dalam LAKIP ini akan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan yaitu 1 (satu) tahun. Secara lengkap LAKIP memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil yang telah diperoleh. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah. Dalam LAKIP berisi tentang kinerja instansi dan akuntabilitasnya yaitu

gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam visi, misi, tujuan, sasaran organisasi dan merupakan media akuntabilitas setiap instansi.

Jelang evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) tahun 2023, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menekankan pentingnya hasil evaluasi yang berdampak. Evaluasi SAKIP, RB, dan ZI tidak boleh hanya sekadar menjadi rutinitas tetapi harus bisa memunculkan perubahan. “Sesuai dengan arahan Presiden dan agar hasil evaluasi lebih berdampak, maka fokus evaluasi AKIP 2023 akan lebih menekankan pada upaya penanganan kemiskinan ekstrem,” ungkapnya saat memberikan arahan pada Entry Meeting Evaluasi SAKIP, RB, dan ZI 2023, di Jakarta, Rabu (02/08).

### ***Stewardship Theory***

Teori *Stewardship* mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik (Donaldson & Davis, 1989, 1991). Dalam teori *stewardship* manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, steward akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya, karena steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kiat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Steward akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari *stewardship* adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. Namun demikian tidak berarti steward tidak mempunyai kebutuhan hidup

Teori *stewardship* dibangun berdasarkan asumsi filosofis tentang hakikat manusia, yaitu manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak secara bertanggung jawab, mempunyai integritas dan kejujuran terhadap orang lain. Pencapaian keberhasilan dalam suatu organisasi pemerintahan dapat dicapai dengan memaksimalkan utilitas kepala sekolah dan manajemen. Teori *stewardship* dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi sektor publik seperti organisasi pemerintah dan laba lainnya

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Akuntabilitas Publik**

Dalam perancangan sistem pengendalian internal daerah (SPI), Peraturan Pemerintah No. 60 merupakan patokan bagi pemerintah kota dan kabupaten dalam merancang sistem pengendalian internal daerah (SPI). Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, kelemahan struktur pengendalian internal, dan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan adalah SPI titik-titik lemah yang dapat menimbulkan masalah dalam kegiatan pengendalian internal, maka dari itu dibentuknya sistem pengendalian internal (Nurwati, 2015).

Kelemahan SPI menurut BPK yang dirangkum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) biasanya diakibatkan oleh kelalaian pejabat atau pelaksana yang bertanggung jawab dalam penyajian laporan keuangan, tidak optimalnya pelaksanaan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan kewajibannya, serta tidak seutuhnya memahami ketentuan-ketentuan yang sah, kurangnya koordinasi dengan pihak terkait, lemahnya kegiatan pengawasan dan pengendalian, prosedur inventarisasi yang kurang memadai, dan lemahnya sistem aplikasi yang digunakan, dan entri kurang lengkap atau tidak tepat. Misalnya, peralatan yang tidak ditampilkan di neraca/nilai aset di neraca berbeda dengan catatan pendukung.

Pengendalian internal menjamin bahwa setiap program atau kegiatan diharapkan dapat memaksimalkan dan mempengaruhi kinerja lembaga secara keseluruhan. Menurut penelitian Sahala, dkk (2022) juga menyatakan bahwa kelemahan sistem pengendalian internal berpengaruh

negatif terhadap akuntabilitas pemerintah Fadli, dkk (2021) dan Tiya & Trisna, (2020) juga menyatakan hal serupa bahwa kelemahan SPI berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pemerintah.

Namun berbagai penelitian telah dilakukan mengenai dampak sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kinerja instansi.

*Hipotesis 1: Kelemahan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap Akuntabilitas Publik*

### **Pengaruh Temuan Audit Terhadap Kualitas Akuntabilitas Publik**

Segala jenis penipuan dalam laporan keuangan pemerintah merupakan temuan audit BPK. Berdasarkan Noviyanti & Kiswanto, (2016) bahwa kerugian pemerintah menjadi penyebab ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Badan BPK melakukan pengecekan untuk memberikan penilaian kepada pemerintah daerah atas laporan keuangan yang dikeluarkan.

Berdasarkan (BPKP 2011) menyatakan bahwa model Akuntabilitas Audit Internal merupakan media komunikasi, kerangka penilaian dan peta jalan perbaikan yang tertib. Terdapat 5 tingkatan dalam mengklasifikasikan kemampuan aparat pengendalian internal, dengan tujuan untuk mengukur kemampuan aparat pengendalian internal. Temuan hasil audit merupakan kasus yang ditemukan oleh BPK dalam kualitas laporan keuangan kinerja instansi pemerintah karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan antar pengendalian atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memburuknya kinerja instansi pemerintah menggambarkan banyaknya pelanggaran. Semakin tinggi temuan audit maka semakin rendah kinerja suatu instansi pemerintah.

Penelitian yang dilakukan (Noviyanti dan Kiswanto 2016) variabel temuan audit BPK berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Standar akuntansi keuangan mengonsep standar dan metode yang dinyatakan sebagai pedoman umum dalam praktik akuntansi perusahaan di lingkungan tertentu. Selain pendapat Badan Pemeriksa Keuangan, kualitas Laporan Keuangan juga dapat dilihat jika disusun sesuai dengan peraturan Pemerintah. Standar Akuntansi (SAP), disusun melalui sistem akuntansi pemerintah daerah (Pujanira & Taman, 2017).

Kajian hasil CPC menunjukkan bahwa institusi dengan peringkat kinerja institusi yang lebih rendah mempunyai temuan audit CPC yang lebih banyak. Artinya, pemerintah harus lebih berhati-hati dalam pengelolaan keuangan, tidak hanya dari segi akuntansinya saja, namun kaitannya dengan kinerja instansi. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa hasil audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan penelitian (Shafira 2019), (Djanegara et al. 2017), (Kurnia 2020) sehingga hipotesis kedua penelitian ini:

*Hipotesis 2 : Temuan audit Hasil berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Publik*

### **Pengaruh Total Belanja Terhadap Kualitas Akuntabilitas Publik**

Pengaruh Total Belanja Terhadap Kualitas Akuntabilitas Publik Total belanja mencerminkan banyaknya infrastruktur dan fasilitas yang sedang dibangun. Peningkatan jumlah mereka akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan akibatnya meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Keseriusan pemerintah Indonesia terhadap otonomi daerah dibuktikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, ditambah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintahan Daerah. Diundangkan pada tanggal 25 Februari 1999 dengan Undang-Undang Nomor 33 tentang Otonomi Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Peraturan ini adalah digunakan sebagai aturan umum untuk melaksanakan kebijakan otonomi daerah di seluruh Indonesia. kecuali Aceh dan Papua yang diberikan otonomi khusus. Untuk mencapai sasaran anggaran yang dirumuskan dengan jelas dan terorganisir, maka otoritas dapat dengan mudah mengetahui informasi penggunaan anggaran yang menyertai realisasi

anggaran. Untuk memenuhi tujuan anggaran instansi pemerintah, perlu disediakan informasi yang jelas dan rinci tentang tujuan anggaran dengan cara yang mudah dipahami oleh perencana anggaran. Untuk mencapai sasaran anggaran dalam rangka pemerintahan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan menetapkan arah dan pedoman umum serta memberikan informasi mengenai maksud dan tujuan tertentu. berfungsi sebagai dokumen tujuan.

Menurut penelitian (Bastian,2006) kejelasan pengaruh anggaran pendapatan berdampak positif terhadap pencapaian target dan dapat berpengaruh pada tingkat keputusan yang diambil oleh karyawan. Penyusunan perencanaan akuntabilitas kinerja juga dituangkan dalam rencana strategis dimaksud, yang tidak terlepas dari indikator hasil realisasi perencanaan pemerintah. Beberapa penelitian juga sejalan dengan penelitian bastian diantaranya (Pujiwidodo 2016), (Armaja, dkk 2017) yang menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hingga nantinya indikator-indikator tersebut dapat dibandingkan dengan realisasi yang dihasilkan dan menjadi wujud akuntabilitas pemerintah dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja. Namun berdasarkan penelitian (Nugroho 2018) menyatakan bahwa total belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

*Hipotesis 3: Total Belanja berpengaruh negatif terhadap Kualitas Akuntabilitas Publik.*

## 2. METODE PENELITIAN

### Akuntabilitas

Akuntabilitas Publik diukur dengan menggunakan skor SAKIP dari IPP yang diperoleh dari LAKIP. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk menetapkan dan mengukur, mengumpulkan, mengkategorikan, merangkum, dan melaporkan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kinerja instansi; sistematisa alat, dan prosedur (Peraturan Presiden 2014, No. 29 Tahun 2014).

### Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

Kelemahan sistem pengendalian internal merupakan permasalahan yang terjadi terkait pencatatan dan pelaporan keuangan seperti proses penyusunan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, pencatatan akun pada laporan keuangan tidak akurat hingga sistem informasi akuntansi yang belum memadai. Dalam penelitian ini variabel kelemahan sistem pengendalian internal diukur berdasarkan jumlah temuan kasus atas kelemahan sistem pengendalian internal

### Temuan Audit

Variabel temuan audit atas ketidakpatuhan pada penelitian ini diukur dengan melihat tingkat materialitas nilai temuan, yaitu jumlah temuan atas ketidakpatuhan (dalam rupiah) dibandingkan dengan total realisasi belanja lalu dikalikan 100. Hal ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ichsan Siregar & Jumaidi Rudiansyah (2019) dan Mustikarini dan Fitriasari (2012). Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Temuan (Dalam Rupiah)}}{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}} \times 100$$

### Total Belanja

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan

wajib dan urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan.

### Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian pada seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2021. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampel jenuh yaitu mengambil seluruh Kabupaten/Kota Indonesia pada tahun 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu membaca, mempelajari dan mengolah data untuk penelitian ini. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang bersumber dari BPK PPID dan Skor SAKIP yang dari LAKIP yang diolah dari Kementerian Pan dan RB-RI.

### Metode Analisis Data

Model persamaan regresi berganda pada penelitian ini disajikan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y : Kualitas Akuntabilitas Publik
- X1 : Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
- X2 : Temuan Audit
- X3 : Total Belanja
- $\alpha$  : Konstanta
- $\beta_1$ - $\beta_3$  : Koefisien
- $\varepsilon$  : error

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil penelitian

#### Statistik Deskriptif

Analisis data statistik deskriptif yang disajikan dalam penelitian ini meliputi Minimal, Maksimal, Mean, dan Standar Deviasi (SD). Berikut adalah hasil analisis statistik deskriptif dari data penelitian.

**Tabel 1. Analisis Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	384	1,41	4,98	3,3232	0,74533
X1	384	1	17	5,89	2,574
X2	384	0,00	2,93	0,1993	0,23550
X3	384	166967560817	7819077754681	1566589788707,15	990959420331,047

### Hasil Analisis Data

#### Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik terdiri dari uji normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. Tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		384
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,67722688
Most Extreme Differences	Absolute	0,055
	Positive	0,035
	Negative	-0,055
Kolmogorov-Smirnov Z		1,084
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,191

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan table 2 dilihat bahwa hasil perhitungan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-smirnov test* untuk *Unstandardized Residual* memiliki nilai Asymp Sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05 sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal.

**Tabel 3. Uji Multikolinearitas**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.057	0,114		26,708	0,000		
	X1	-0,028	0,014	-0,096	-2,060	0,040	1,000	1,000
	X2	-0,143	0,157	-0,045	-0,908	0,365	0,880	1,137
	X3	2,925	0,000	0,389	7,826	0,000	0,880	1,137

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan table 3. diatas, disimpulkan bahwa semua variabel penelitian memiliki VIF < 10 dan nilai Tolerance > 0,10, yang berarti tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model persamaan regresi.

**Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,610	0,065		9,449	0,000
	X1	0,000	0,008	0,003	0,060	0,952
	X2	0,042	0,089	0,026	0,474	0,636
	X3	-4,076	0,000	-0,105	-1,935	0,054

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Berdasarkan Tabel 4 Hasil pengujian heteroskedastisitas pada variabel independen masing masing memiliki nilai sig lebih besar dari pada 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada variabel penelitian.

### Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan uji hipotesis dengan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menguji pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat. Oleh karena itu, analisis regresi linear sederhana digunakan menguji hipotesis pertama, hipotesis kedua, dan hipotesis ketiga. Hasil dari uji regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. Uji Hipotesis**

Variabel	Koefisien	t-hitung	Sig	Hasil
(X <sub>1</sub> )	-0,028	-2,060	0,040	Diterima
(X <sub>2</sub> )	-0,143	-0,908	0,365	Diterima
(X <sub>3</sub> )	0,000	7,826	0,000	Diterima
R Square	0,174			
Adjusted R <sup>2</sup>	0,168			
F	26,757			
Sig.	0,000			

Berdasarkan hasil regresi di tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai statistik F dalam model adalah sebesar 41,345 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian layak untuk digunakan. Kemudian untuk hasil dapat dilihat nilai Adj. R<sup>2</sup> sebesar 0,168 yang menunjukkan bahwa sebesar 16,8% variabel kualitas akuntabilitas publik dapat dijelaskan oleh variabel kelemahan sistem pengendalian intern, temuan audit, dan total belanja sedangkan sisanya sebesar 83,2 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Hipotesis pertama yang dirumuskan adalah kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kualitas akuntabilitas publik, variabel kelemahan sistem pengendalian intern memiliki koefisien regresi ( $\beta$ ) sebesar -0,028 dan nilai t hitung sebesar -2,060. Sementara nilai signifikansinya sebesar 0,040 atau berada dibawah nilai 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kualitas akuntabilitas publik sehingga hipotesis pertama diterima. Hipotesis kedua yang dirumuskan adalah temuan audit intern berpengaruh negatif terhadap kualitas akuntabilitas publik, variabel temuan audit memiliki koefisien regresi ( $\beta$ ) sebesar -0,143 dan nilai t hitung sebesar -0,908. Sementara nilai signifikansinya sebesar 0,365 atau berada diatas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kelemahan temuan audit tidak berpengaruh terhadap kualitas akuntabilitas publik sehingga hipotesis kedua ditolak. Hipotesis ketiga yang dirumuskan adalah total belanja berpengaruh positif terhadap kualitas akuntabilitas publik, variabel total belanja memiliki koefisien regresi ( $\beta$ ) sebesar 0,000 dan nilai t hitung sebesar 7,826. Sementara nilai signifikansinya sebesar 0,000 atau berada dibawah nilai 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa total belanja berpengaruh positif terhadap kualitas akuntabilitas publik sehingga hipotesis ketiga diterima.

### 3.1.Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis pertama yang menyatakan kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kualitas akuntabilitas publik, artinya semakin kecil kelemahan sistem pengendalian intern maka hal ini akan memberikan peningkatan terhadap kualitas akuntabilitas publik. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *stewardship* yang menjelaskan bahwasanya keadaan dimana *steward* lebih mengutamakan pencapaian suatu organisasi dibandingkan dengan tujuan maupun kepentingan individu (Donaldson & Davis, 1989). Sistem



Pengendalian Intern atau yang disingkat dengan SPI menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah “proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Semakin baik sistem pengendalian internal atau semakin sedikit kelemahan dalam sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah akan dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas publik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sah, *et al* (2022) yang juga menyatakan bahwa kelemahan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pemerintah.

Hasil pengujian hipotesis kedua yang menyatakan temuan audit tidak berpengaruh terhadap kualitas akuntabilitas publik, pemerintah daerah yang mendapatkan jumlah temuan audit yang banyak belum tentu memiliki kinerja keuangan pemerintah daerah yang buruk. Pemerintah daerah dalam menjalankan kinerja keuangannya kurang dipengaruhi oleh hasil dari temuan audit. Pelaksanaan revisi maupun kritik saran dari BPK hanya sebatas pemenuhan kewajiban tanpa adanya tindak lanjut dari pemerintah daerah untuk melakukan kinerja keuangan dengan baik. Jumlah temuan audit sedikit, maka kinerja keuangan pemerintah daerah yang dilakukan baik dari pada daerah yang memiliki jumlah temuan audit banyak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Marfiana (2013) yang menyatakan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap kualitas akuntabilitas publik yang di nilai melalui kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil pengujian hipotesis ketiga yang menyatakan total belanja berpengaruh positif terhadap kualitas akuntabilitas public. Hasil penelitian ini dapat mengkonfirmasi teori *stewardship* yang didefinisikan sebagai teori yang memperlihatkan keadaan dimana *steward* lebih mengutamakan pencapaian suatu organisasi dibandingkan dengan tujuan maupun kepentingan individu Donaldson & Davis (1989). Total belanja merupakan salah satu hal yang mencerminkan *steward* lebih mengutamakan pencapaian suatu organisasi yaitu kepentingan dalam merealisasikan anggaran yang sudah di rancang, seperti halnya infrastruktur dan fasilitas yang sedang dibangun. Peningkatan jumlah realisasi anggaran akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan akibatnya meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Menurut penelitian Bastian, (2006) penyusunan perencanaan akuntabilitas kinerja juga dituangkan dalam rencana strategis realisasi anggaran, yang tidak terlepas dari indikator hasil realisasi perencanaan pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pujiwidodo, (2016), Armaja, dkk (2017) yang menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang mencerminkan kualitas akuntabilitas publik.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern, temuan audit, dan total belanja terhadap kualitas akuntabilitas publik pada Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kualitas akuntabilitas publik.
2. Temuan audit tidak berpengaruh terhadap kualitas akuntabilitas publik.
3. Total Belanja berpengaruh positif terhadap kualitas akuntabilitas publik.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, orang tua penulis yang memberikan dukungan finansial dan non-finansial, Fadli sebagai dosen pembimbing, teman teman Himpunan Mahasiswa S1 Akuntansi, dan Universitas

Bengkulu yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, yang membuat penulis dapat menyelesaikan penelitian ini hingga selesai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N.& F.F. (2021) „Analisis Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Isak 35 Pada Yayasan An-Nahl Bintang“, *Accounting, Finance and Auditing (JAFA)* Vol. 3 No. 2, 3(2), pp. 24–34. doi:<https://doi.org/10.37673/jafa.v3i02.1206>.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1989). CEO governance and shareholder returns: Agency theory or stewardship theory. *The Academy of Management*.
- Bastian, Indra. 2011. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Purba, Sahala. 2020. Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)* Vol. 3 No. 1
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Noviyanti, N. A. K., & Kiswanto. (2016). *Accounting Analysis Journal*. 3(4), 457–465
- Naopal, F., Rahayu, S., & Yudowati, S. P. (2017). Pengaruh Karakteristik Daerah, Jumlah Penduduk, Temuan Audit, Dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Assets*, 7 (1), 56–68
- Muid, D. (2014). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2009-2011. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2009-2011, 4, 513–527
- Kiswanto, K., & Fatmawati, D. (2019). Determinan Kinerja Pemerintah Daerah : Ukuran Pemda, Leverage, Temuan Audit dan Tindak Lanjutnya. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(1), 44. <https://doi.org/10.33603/jka.v3i1.1689>